

Efektivitas Kinerja Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Banjarsari

Sunardi

Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: xxxxx

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Komite sekolah SMPN 1 Banjarsari yang sangat proaktif mendukung pelaksanaan proses pendidikan di SMPN 1 Banjarsari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas kinerja komite sekolah di SMPN 1 Banjarsari, didasarkan pada empat peran komite sekolah yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari, dan objek penelitian adalah efektivitas kinerja komite sekolah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah; (1) Observasi partisipasi pasif, (2) Wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*), (3) Dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) belum efektif, (2) Kinerja komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai pemberi dukungan (*supporting agency*) telah berjalan secara efektif, (3) Kinerja komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) belum berjalan secara efektif, dan (4) Kinerja komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai penghubung telah berjalan secara efektif.

Kata Kunci: efektivitas; kinerja; peran komite

1. Pendahuluan

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, menjadi ruang bagi orangtua peserta didik, masyarakat, dan pihak sekolah menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan bagi peningkatan pendidikan di sekolah. Komite sekolah merupakan badan independen yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan kepala sekolah tetapi menjadi mitra kepala sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk memajukan sekolah.

Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Komite sekolah merupakan wujud nyata dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam lingkungan pendidikan. Menurut Sumpeno (2009:135):

”.....ada beberapa alasan mengapa partisipasi menjadi penting dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yaitu: a) partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak; b) Pemecahan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan proses interaksi, kerja sama dan berbagi peran; c)

Pengembangan sumber daya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat, oleh karena itu dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan maka harus melibatkan masyarakat”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang dikaji, yaitu efektivitas kinerja komite sekolah dengan peran komite sekolah sebagai parameternya. Pemilihan metoda ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang memberikan gambaran dan melukiskan realita sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit.

Satori (2014:22) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah :

“Penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat di desain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan”.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017 bertempat di SMPN 1 Banjarsari yang beralamat di Jalan Pasirjengkol No. 30 Banjarsari Kabupaten Ciamis. Keabsahan dan keajegan (*reliabilitas*) penelitian ini diuji dengan cara melakukan proses triangulasi sumber dan triangulasi teknik secara terus menerus sejak data dideskripsikan, dianalisis, ditafsirkan hingga data tersebut disimpulkan sebagai upaya menjawab masalah penelitian. Menurut Satori (2015:164-15) penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Penelitian ini dirancang mengikuti model interaktif dari Maxwell (dalam Alwasilah, 2003:86), yang mempertimbangkan keselarasan keenam komponen berikut : (1) problem penelitian; (2) pertanyaan penelitian; (3) tujuan penelitian; (4) fokus penelitian; (5) metode penelitian; dan (6) validitas penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

A. Peran komite sebagai badan pertimbangan

Kinerja komite dalam menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dapat diketahui dari beberapa indikator yang harus diperankan oleh komite sekolah. Indikator-indikator tersebut yakni : (1) Memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), (2) Memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), (3) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan RAPBS, (4) Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS, (5) Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah, (6) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan (manajemen) pendidikan di sekolah, (7) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru, (8) Membantu mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, (9) Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, (10) Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, (11) Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, baru mampu menjalankan 9 parameter indikator secara efektif. Didasarkan pada teori efektifitas yang dikutip oleh penulis, dapat ditafsirkan bahwa komite sekolah SMPN 1 Banjarsari belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai badan pertimbangan.

B. Peran komite sebagai badan pendukung

Kinerja komite sekolah dalam menjalankan peran sebagai pendukung dapat diketahui dari beberapa indikator yang harus diperankan. Indikator-indikator tersebut yakni : (1) Memantau kondisi ketenagaan di

sekolah, (2) Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, (3) Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah, (4) Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, (5) Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah, (6) Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah, (7) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah, (8) Memantau kondisi anggaran di sekolah, (9) Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, (10) Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, (11) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, telah menjalankan perannya secara efektif, hal tersebut terlihat dari telah dijalankannya 11 indikator tersebut.

C. Peran Komite Sebagai Badan Pengontrol

Kinerja komite dalam menjalankan peran sebagai pengontrol dapat diketahui dari beberapa indikator yang harus diperankan. Indikator-indikator tersebut yakni : (1) Mengontrol proses pengambilan keputusan sekolah, (2) Mengontrol kualitas kebijakan pendidikan, (3) Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah, (4) Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, (5) Pengawasan terhadap kualitas program sekolah, (6) Memantau organisasi sekolah, (7) Memantau penjadwalan program sekolah, (8) Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, (9) Memantau sumber daya pelaksana program sekolah, (10) Memantau partisipasi stake holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah, (11) Memantau hasil ujian sekolah, (12) Memantau angka partisipasi sekolah, (13) Memantau angka mengulang sekolah, (14) Memantau angka bertahan di sekolah.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, baru mampu menjalankan sepuluh indikator secara efektif. Didasarkan pada teori efektifitas yang dikutip oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah SMPN 1 Banjarsari belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai badan pengontrol.

D. Peran Komite Sebagai Badan Penghubung

Kinerja komite dalam menjalankan peran sebagai penghubung (*mediator*) dapat diketahui dari beberapa indikator yang harus diperankan. Indikator-indikator tersebut yakni : (1) Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan, (2) Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, (3) Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah, (4) Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, (5) Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program program terhadap sekolah, (6) Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, (7) Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah, (8) Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, (9) Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat, (10) Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan sekolah, (11) Mengkoordinasikan bantuan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, telah menjalankan perannya secara efektif, hal tersebut terlihat dari telah dijalankannya 11 indikator tersebut.

3.2 Pembahasan

A. Peran komite sebagai badan pertimbangan

Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory ageny*), komite sekolah SMPN 1 telah melaksanakan perannya dengan baik, hal tersebut terlihat pada saat sekolah menyusun rencana program kegiatan sekolah, memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), berpartisipasi aktif dalam penyusunan RAPBS, dan memberikan pertimbangan perubahan RAPBS serta ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.

Dalam pelaksanaan program yang dibuat, komite sekolah memberikan masukan terhadap proses pengelolaan (manajemen) pendidikan di sekolah, serta memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru. Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut memberikan arti bahwa, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah harus melalui pertimbangan Komite Sekolah. Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* ini

mencerminkan harapan sinergitas antara kepala sekolah dan komite SMP Negeri 1 Banjarsari. Tanpa ada sinergitas akan berpengaruh terhadap *output* program yang dijalankan.

Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, berperan dalam membantu mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, serta memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pantjastuti (2008: 83) bahwa peran komite sekolah antara lain: memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) RAPBS; (3) kriteria tenaga kependidikan; dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, serta Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang menyatakan bahwa peran Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan sekolah dalam rangka mengidentifikasi sumber daya sekolah, proses pembelajaran, ketenagaan, kebutuhan sarana prasarana sekolah, kebijakan sekolah, RAPBS, dan sebagainya.

Dalam prakteknya, meski secara umum komite sekolah SMPN 1 Banjarsari telah menjalankan perannya sebagai badan pertimbangan (*Advesory Agency*), namun ada beberapa indikator yang belum secara efektif dijalankan oleh komite sekolah, diantaranya: (1) peran dalam membantu mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, (2) peran dalam memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah, dan (3) peran dalam memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Identifikasi terhadap sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, akan menimbulkan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, program sekolah akan mendapatkan dukungan dari masyarakat baik dalam bentuk ide atau gagasan, anggaran maupun bantuan sarana dan prasarana yang lainnya. Sinergitas seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah, tidak selalu bergantung kepada kebijakan pemerintah tetapi mampu berdiri sendiri dengan memanfaatkan potensi sekolah serta masyarakat di sekitarnya. Kesemuanya itu hanya dapat terjadi apabila komite sekolah telah mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Mulyasa (2003:190), bahwa komite sekolah memiliki fungsi:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 3) Menampung dana menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang ditujukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : a. Kebijakan dan program pendidikan; b. rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah; c. kriteria kinerja satuan pendidikan; d. kriteria tenaga kependidikan; e. Kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

B. Peran komite sebagai badan pendukung

Peran sebagai pendukung baik dalam pemikiran, anggaran, maupun tenaga mutlak diperlukan untuk menghasilkan sebuah program yang bermutu di sekolah. Kedua hal ini merupakan hal yang utama. Pemahaman bersama akan berdampak terhadap pengembangan mutu pendidikan yang berkualitas. Peran Komite Sekolah sebagai *supporting agency* tidak hanya berupa dukungan dana seperti iuran rutin, namun juga berupa sumbangan tenaga dan pikiran dalam rangka penyelenggaraan mutu pendidikan.

Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), komite SMPN 1 Banjarsari berperan dalam pengelolaan sumber daya dengan melakukan pemantauan terhadap kondisi ketenagaan di sekolah, melakukan mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, serta memobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.

Komite sekolah juga berperan dalam pengelolaan sarana dengan melakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, melakukan mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah, mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana sekolah serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah. Dalam Pengelolaan Anggaran, komite telah berperan dengan baik dengan melakukan pemantauan terhadap kondisi anggaran di sekolah, melakukan mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah serta melakukan evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pendukung memiliki alasan strategis, terutama berkaitan dengan penggalangan dana yang berpeluang besar dalam peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Banjarsari. Sebagaimana diungkapkan ketua komite sekolah bahwa peran memberi dukungan dilakukan melalui keterlibatan penyusunan RKS/RKT/RKAS, mendukung sekolah dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, mendukung sekolah dalam merumuskan visi misi dan kegiatan serta tujuan sekolah. Dengan demikian dukungan yang diberikan komite SMP Negeri 1 Banjarsari sudah selaras dengan upaya pemerintah bahwa dukungan tidak hanya berbentuk dana atau keuangan, melainkan juga dalam bentuk tenaga, ide, dan gagasan. Sejalan pula dengan yang dikemukakan oleh Rusman (2008:512), bahwa:

“Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan”.

Selain itu, komite SMPN 1 Banjarsari telah melaksanakan perannya sebagai badan pendukung dengan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dibentuknya komite sekolah sebagaimana yang tercantum dalam dalam Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 bahwa tujuan Komite Sekolah yaitu:

(1) mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa komite sekolah SMPN 1 Banjarsari telah memfungsikan diri sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa (2003:190) bahwa fungsi dari komite sekolah adalah : (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) Menampung dana menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang ditujukan oleh masyarakat, (4) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

C. Peran Komite Sebagai Badan Pengontrol

Sebagai badan pengawasan, Komite SMP Negeri 1 Banjarsari sudah berjalan dengan baik. Sebagai *controlling agency* Komite SMP Negeri 1 Banjarsari mempunyai peran yang dapat mengontrol kebijakan atau program kerja sekolah sehingga tidak menyimpang dari aturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa komite sekolah dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pendidikan, melakukan pemantauan terhadap alokasi anggaran dalam pelaksanaan program-program sekolah, maupun melakukan pemantauan terhadap *output* sekolah seperti hasil ujian akhir, angka mengulang, angka partisipasi, dan angka bertahan.

Peran sebagai *controlling agency* bertujuan meminimalisir terjadinya penyimpangan program dan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kualitas. Pengawasan yang dilakukan komite SMP Negeri 1 Banjarsari berupa pemantauan terhadap proses pembelajaran, hasil lulusan, kenaikan kelas serta penggunaan dana-dana sekolah maupun dana bantuan yang lain, serta memantau kondisi sarana

prasarana, dan kondisi lingkungan SMP Negeri 1 Banjarsari. Hal ini merupakan upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Dari empatbelas indikator peran komite sekolah sebagai pengontrol, hasil penelitian menunjukkan sembilan indikator menyatakan bahwa komite telah melaksanakan perannya secara efektif, dan lima indikator menyatakan bahwa komite sekolah belum efektif dalam melaksanakan perannya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa komite sekolah SMPN 1 Banjarsari belum melaksanakan perannya secara efektif sebagai badan pengontrol (*controlling agency*).

D. Peran Komite Sebagai Badan Penghubung

Sebagai badan penghubung, dalam penyusunan program kegiatan sekolah komite sekolah SMPN 1 Banjarsari bertindak dalam menghubungkan antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan, melakukan identifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, serta membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah.

Seperti dijelaskan dalam indikator kinerja komite sekolah, dalam menjalankan peran badan penghubung, komite sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut: (1) menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, (2) membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah, (3) menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan, dan sebagainya.

Peran sebagai penghubung komite SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai sekolah standar nasional telah berjalan dengan efektif, karena kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar telah berjalan dengan baik dalam mendukung program-program sekolah. Peran komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam menyampaikan informasi dari sekolah kepada masyarakat atau aspirasi masyarakat dan orang tua siswa kepada sekolah, yang telah dilakukan diantaranya ikut memobilisasi dan mengkoordinir bantuan masyarakat kepada sekolah apabila ada iuran untuk kegiatan rehabilitasi dan penambahan sarana prasarana sekolah.

Dalam penyusunan program kegiatan sekolah komite sekolah SMPN 1 Banjarsari bertindak sebagai penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan, melakukan identifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, serta membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah.

Dalam kegiatan pelaksanaan program sekolah, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari, telah melakukan sosialisasi kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program-program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah.

Dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, komite sekolah SMPN 1 Banjarsari telah melakukan kegiatan mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan sekolah, serta mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

Melihat tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap sekolah era sekarang ini, komite sekolah perlu memahami dan melaksanakan peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu caranya dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta untuk mengambil peran serta aktif dalam bidang pendidikan. Komite sekolah dan masyarakat dapat melaksanakan peran dengan cara melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program sekolah. Dengan keterlibatan secara langsung, maka masyarakat yang telah di wadahi dalam komite sekolah akan merasa ikut memiliki dan mengelola lembaga pendidikan sehingga baik buruknya mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Pengelolaan pendidikan yang baik di sekolah akan mempengaruhi terjadinya peningkatan mutu proses pendidikan. Apabila mutu proses pembelajaran meningkat, maka peluang peningkatan kualitas hasil belajar siswa semakin besar.

Uraian di atas sesuai dengan fungsi dari komite sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 196 ayat 3 UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bahwa fungsi Komite Sekolah/Madrasah adalah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan, serta tujuan dibentuknya komite sekolah sebagaimana yang tertuang dalam Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 bahwa tujuan Komite Sekolah yaitu: (1) mewedahi, menyalurkan aspirasi, dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2)

meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Dari data hasil penelitian terhadap sebelas parameter indikator peran komite sekolah sebagai badan penghubung yang penulis dapatkan baik melalui wawancara, survey maupun studi dokumentasi, penulis menafsirkan bahwa komite sekolah SMPN 1 Banjarsari telah melaksanakan perannya secara efektif sebagai badan penghubung (*mediator agency*).

4. Simpulan

Kinerja komite sekolah SMPN 1 Banjarsari sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan adanya parameter indikator peran sebagai pemberi pertimbangan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh komite sekolah. Diantara parameter-parameter tersebut adalah : (1) Peran Komite Sekolah dalam membantu mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, dan (2) Peran Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. Sebagai pemberi dukungan (*supporting agency*) komite sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari sudah berjalan efektif, antara lain berupa dukungan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, maupun anggaran. Dalam menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan (*supporting agency*), komite SMP Negeri 1 Banjarsari menunjukkan dukungannya dalam penyusunan RAPBS mengacu pada program kerja yang sudah dibuat oleh sekolah, jika ada kekurangan pendanaan maka komite melakukan penggalan dana bersama orang tua siswa. Dukungan juga diberikan kepada sekolah dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, perumusan visi misi dan kegiatan serta tujuan sekolah.

Kinerja komite sekolah SMPN 1 Banjarsari sebagai sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) belum berjalan secara efektif, dikarenakan ada beberapa parameter indikator sebagai badan pengontrol yang belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh komite sekolah, diantara parameter-parameter tersebut adalah (1) Peran Komite Sekolah dalam melakukan pemantauan terhadap organisasi sekolah, (2) Peran Komite Sekolah dalam memantau angka partisipasi sekolah, (3) Peran Komite Sekolah dalam memantau angka mengulang sekolah, dan (4) Peran Komite Sekolah memantau angka bertahan di sekolah. Kinerja komite sekolah SMPN 1 Banjarsari sebagai sebagai penghubung telah berjalan dengan efektif oleh komite SMP Negeri 1 Banjarsari sebagai berikut, diantara kegiatan yang sudah dilaksanakannya antara lain : (1) menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, (2) membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada orang tua siswa, (3) menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik ed rev*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Kemendiknas. 2002. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Mulyasa, E. 2007 *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rusman. 2011 *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, CV.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)*. Jakarta : UU
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: UU

